

MONITORING PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2015

No	Nomor Surat	Tanggal Pengaduan / Pemberi Dokumen	Nama	Jenis Kelamin	Alamat Rumah	E-mail	No. Telp	Jenis Pengaduan	Isi Aduan	Final
1		21 Juni 2013	Zainal Arifin	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah. Terkait pengaduan mengenai indikasi pelanggaran lelang online Pengadaan Meubelair Ruang Belajar Poltekes Riau TA 2013	Pengaduan sudah lebih dari 104 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
2	14/PM/PIK/09/2013	24 September 2013	Abdul Rahman	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan terkait Dugaan adanya aliran dana gratifikasi kepada Zulkifli Hasan (Menteri Kehutanan) oleh PT Ciliandra Perkasa.	Tortama KN IV melalui ND No.29/ND/XVII/01/2015, menyampaikan bahwa permasalahan tersebut merupakan kasus tindak pidana yang menjadi ranah aparat penegak hukum, dan telah ditangani oleh PNNIS Kementerian Kehutan dalam hal ini BKSDA Riau yang sudah tentu di bawah koordinasi aparat penegak hukum setempat, sehingga BPK hanya dapat memantau penyelesaian permasalahan tersebut.
3	1/PM/PIK/01/2014	02 Januari 2014	Makmur Siswanto	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah.	Tanggapan Tortama VI bahwa bukan merupakan sampel pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan yang menjadi objek pemeriksaan pada AKN VI. (Proses penyampaian Kembali ND dari Humas ke Tortama KN VII). Penyampaian Surat Keluar dari Sekretaris Jenderal BPK No. 257/S/X/04/2015 tanggal 30 April 2015 terkait tanggapan BPK atas Laporan Pengaduan Masyarakat yang dikirim via Pos terhadap si Pengadu.
4		04 Juni 2014	Erwinus Laia	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah.(Keberadaan Universitas Setia Budi Mandiri Medan yang di duga beroperasi ilegal di Kabupaten Nias Selatan.)	Sudah Terpenuhi (Bahwa dokumen dari si pengadu akan dijadikan bahan untuk audit selanjutnya dan apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi atau di arahkan ke Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara.)
5	7/PM/PIK/07/2014	23 Juli 2014	Sigit Purwanto	Laki-Laki					Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah.	Pengaduan sudah lebih dari 52 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
6	8/PM/PIK/08/2014	25 Agustus 2014	Tiba Parangka	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait pemindahbukuan dana pada rekening Kas Umum daerah yang tidak sesuai ketentuan.	1. Penyampaian ND dari PI ke Karo Humas dengan No.212/ND/X.2.1/3/2015 Tanggal 31 Maret 2015. Dari Karo Humas penyampaian ND No.392/ND/X.2/3/2015 Tanggal 31 Maret 2015, ke Sekjen BPK perihal konsep surat keluar untuk ke si pengadu. Surat keluar sedang proses untuk di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal BPK (Sekjen BPK). 2. Sudah Terpenuhi dengan Surat Keluar dari Sekretaris Jenderal No.197/S/X/04/2015 tanggal 1 April 2015 yang isinya menjawab Pengaduan tersebut. Dikirim Via Pos dengan No. Resi 14159951721, Tgl. 09-04-2015, Pukul 11:31:59)

7	11/PM/PIK/09/2014	01 September 2014	Hasan Buamona	Laki-Laki					Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Tunjangan Profesi Guru yang di indikasi disalah gunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara.	Pengaduan sudah lebih dari 52 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
8		03 September 2014	Perhimpunan Pedagang Spare Parts Karang Anyar dan Taman Sari	Laki-Laki					Lain-Lain terkait adanya surat ancaman pengosongan kios dibawah jalan layang kereta antara stasiun sawah besar dan mangga besar oleh PT Kereta Api.	Sudah Terpenuhi dengan Surat Keluar dari Sekretaris Jenderal No.172/S/X/03/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang isinya menjawab Pengaduan tersebut. Dikirim Via Pos dengan No. Resi 114266506/14159944388, Tgl. 27-03-2015, Pukul 10:57:31)
9		08 September 2014	Moch. Syamsuri, SH, MH.	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan korupsi atau mark up dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Pendidikan (RSP) dan Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM) Universitas Airlangga DIPA Tahun Anggaran 2013.	Pengaduan sudah lebih dari 52 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
10	12/PM/PIK/09/2014	11 September 2014	Nita C.V Monintja	Perempuan					Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Klarifikasi Temuan BPK atas Pemeriksaan Universitas Sam Ratulangi Manado.	Pengaduan sudah lebih dari 52 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
11		22 Oktober 2014	Deperealisme Gea	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah, terkait adanya Indikasi Tindak Pidana Korupsi di SMKN I Lotu di kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMKN I Lotu. Dana yang terindikasi korupsi : Insentif Kepala Sekolah Rp. 1.300.000 dibebankan Biaya Perjalanan Kepala Sekolah Rp. 3.000.000, Biaya Perjalanan Kepala Sekolah Di Luar kota Rp. 4.500.000 dsb, yang dibebankan kepada orang Tua Siswa	1. Untuk di BPK Perwakilan Sumatera Utara Sudah Terpenuhi : Bahwa dokumen dari si pengadu akan dijadikan bahan untuk audit selanjutnya dan apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi atau di arahkan ke Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara. untuk yang di Kasubaud VI.A.II : masih dalam Proses. 2. Pengaduan sudah lebih dari 45 minggu dan belum di tindaklanjuti, maka menjadi tanggung jawab satker terkait untuk menindaklanjutinya apabila nanti si Pengadu menanyakan atau meminta tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
12	13/PM/PIK/09/2014	09 Desember 2014	Ahmad Tawakal P	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya Dugaan Korupsi Tukar menukar tanah Negara (Ruislag) di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar.	Isi dari ND adalah bahwa Dokumen tersebut telah dijadikan bahan pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2014 dan Tim Pemeriksa saat ini sedang menelusuri lebih lanjut atas dugaan korupsi tersebut.
13		15 Desember 2014	Willis Handoko	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan tindakan manipulasi di lingkungan PT Chevron Pacifik Indonesia Wilayah Libo, Kec. Kandis, Kab. Siak, Riau. Yang merugikan negara sekitar 10 Milyar Rupiah, dan terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.	Bahwa surat yang di tujukan pengadu hanyalah sebagai tembusan jadi cukup untuk diketahui tetapi dokumen dari si pengadu juga akan dijadikan bahan untuk audit selanjutnya.
14		05 Januari 2015	Hatta Munir	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan kelebihan lahan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT TPP Seluas kurang lebih 1.000 Ha, Dilakukan pengukuran dengan pembiayaan menggunakan dana APBD kabupaten Indragiri Hulu tahun 2012 sebesar RP. 240.000.000	Bahwa surat tersebut sudah didisposisi dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau ke Kepala Sub Auditorat Riau I sesuai isi ND dari Tortama V yaitu untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan informasi awal dalam pemeriksaan, dan dari BPK Perwakilan Riau hanya mengirimkan lembar disposisi dari Kalan Ke kasubaud Riau I. Apabila si pengadu menanyakan tindak lanjut hal tersebut, untuk disampaikan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaannya

15		19 Januari 2015	Agus Sulistyana	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait Adanya Pemungutan Pungli dana BOS oleh oknum Dinas Tingkat Kab/Kota se Jawa Timur 35 % dari total penerimaan dana BOS di satu sekolah.	Sudah Terpenuhi (Bahwa surat tersebut sudah didisposisi dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur ke Kepala Sub Auditorat Jatim 3 sesuai isi ND dari Tortama V yaitu untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan pemeriksaan di Kabupaten dan Kota Kediri, dan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur hanya mengirimkan lembar disposisi dari Kalan Ke kasubaud Jatim 3. Apabila si pengadu menanyakan tindak lanjut hal tersebut, untuk disampaikan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaannya.)
16	01/PM/PIK/1/2015	19 Januari 2015	Bonifasius Gunung	Laki-laki					Permohonan Pemeriksaan terkait melakukan perhitungan kerugian negara yang benar terhadap PT. Askrindo.	1. Surat sudah disampaikan melalui ND kepada Tortama VII No.209/ND/XII/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang isinya penyampaian pendapat hukum dan resume pendapat hukum atas permasalahan tersebut. Dan dari Tortama KN VII surat di disposisikan ke Kepala Auditorat VII.D (Proses di Kaud VII.D/AKN VII) 2. Sudah Terpenuhi dengan Surat keluar dari Sekjen dengan No 553/S/X/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
17		18 Februari 2015	Moch. Mochtar Jamali	Laki-Laki					Permohonan Apengajuan Tanah Negara Yang dikelola PT. KAI	Bahwa Pengaduan Yang Disampaikan Tidak ada Hubungannya Dengan Tupoksi BPK RI
18		05 Maret 2015	Sururi Mujib	Laki-Laki					Lain-Lain (Permohonan Pengawasan Internal)	Sudah dijelaskan langsung bahwa hal tersebut BPK pusat akan menerima Laporan terkait pemeriksaan Pemkab Kudus tersebut dari perwakilan BPK Prov. Jawa Tengah, sehingga dengan sendirinya terawasi juga dan terkait untuk permintaan melakukan konsultasi terkait hal tersebut di arahkan untuk berkonsultasi dengan perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.

19	02/PM/PIK/3/2015	05 Maret 2015	Riski Yoska Martedi	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi dan pencucian Uang yang dilakukan oleh Ir.Pahri Azhari dkk, dalam beberapa proyek.	Sudah dijelaskan bahwa pengaduan tersebut sudah di sampaikan ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Agung dan KPK maka hal tersebut kewenangannya sudah berada di APH karena terkait korupsi dan pencucian uang. Dan penjelasannya dapat diterima oleh si Pengadu Masyarakat.
20	03/PM/PIK/3/2015	26 Maret 2015	Teuku Zainal Arifin	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan wewenang serta tindak pidana korupsi dengan modus pengurangan proyek di Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi - Kementerian ESDM	Sudah Terpenuhi (Sudah dilakukan pemeriksaan atas hal yang diadukan tinggal menunggu hasilnya di LHP atas Kementerian ESDM)
21	04/PM/PIK/3/2015	27 Maret 2015	Supendy	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan terkait permasalahan tanah antara masyarakat Rempang Galang dengan otorita Batam dan BPN.	
22		30 Maret 2015	Wali Murid MAN Babat Lamongan	Laki-Laki					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran keuangan dalam pengadaan tanah APBN tahun 2012 di Madrasah Aliyah Negeri Babat Kabupaten. Lamongan	Sudah disampaikan melalui Surat Keluar Sekretaris Jenderal BPK No.311/S/X/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang isinya tanggapan BPK RI atas pengaduan masyarakat.
23	05/PM/PIK/3/2015	13 April 2015	Ir. Wayan Mahardika	Laki-Laki					Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait adanya dugaan penyimpangan prosedur pelelangan proyek jalan APBN di NTB TA 2014 dan 2015	Sudah Terpenuhi Penyampaian Nd No Nota Dinas No. 299/ND/XVII/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari tortama KN IV ke Keapal biro humas dan Kerja Sama internasional yang isinya disebutkan bahwa berdasarkan analisis atas substansi pengaduan, satker terkait belum dapat menyimpulkan terjadinya penyimpangan pada proses pengadaan di satker pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB, sehingga AKN IV menyarankan si pengadu untuk melengkapi materi pengaduan dengan bukti-bukti kongkrit yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
24		14 April 2015	a/n PNS Gerakan revolusi Mental 2015						Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan penyimpangan pemberian Tunjangan Kinerja (TUKIN) pegawai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud.	

25		14 April 2015	Andi Bau Malik Barammamase	Laki-Laki					Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan pembatalan sertifikat Hak pakai No.41/1996, GS No.7271/1995 atas nama yayasan olahraga Sulawesi selatan (YOSS)	
26		14 April 2015	nn						Permintaan Pemeriksaan investigasi terhadap Perusahaan Gas negara (PGN) dan tidak mengangkat kembali seluruh anggota direksi yang menjabat saat ini karena diduga banyak merugikan Perusahaan Gas Negara (PGN).	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadakan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap;
27		14 April 2015	Donny Etsamihardja	Laki-Laki					Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah terkait dugaan kecurangan proses lelang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung terkait belanja sewa mobilitas darat kegiatan Asian African carnival.	Disposisi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat ke Kepala Sub Auditorat Jawa Barat I yang isinya untuk diteliti dan dicek kebenarannya dan sebagai bahan pemeriksaan.
28		14 April 2015	Warga Masyarakat Kota Cirebon	Laki-Laki					Pengaduan terkait pemerasan yang dilakukan oleh Kepala Kajari Kota Cirebon Bpk. Asep Sudarman yang sering mendatangi pejabat Walikota Wawali dan OPD-OPD serta IAIN untuk dimintai uang oleh yang bersangkutan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadakan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan ditujukan kepada Menteri ESDM 4. Kronologis peristiwa yang diadakan/dilaporkan tidak jelas.
29		14 April 2015	Para Peduli Tata Kelola Keuangan Negara/Daerah yang baik						Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah, terkait Laporan Keuangan APBD Kabupaten Banyuwangi TA 2014 yang tidak transparan dalam penyajian laporan keuangan tersebut.	Sudah Terpenuhi Surat sudah berada di Tim Pemeriksa yang memeriksa Muara Enim sehingga apabila si Pengadu menanyakan perihal pengaduan tersebut untuk menghubungi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (Dari Perwakilan mengirimkan Disposisi dari Kepala Perwakilannya ke Sub Auditorat Sumsel I)
30		14 April 2015	Subandrio Parhusip	Laki-Laki					Pengaduan terkait perbedaan kelebihan bayar hasil rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terkait kegiatan Pembangunan Jalan Simpang Polma-Salaon dan Jalan Pengurusan-Lumbang Sihombing	Sudah Terpenuhi Surat sudah di balas oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Pengadu sudah datang ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pertemuan.
31		14 April 2015	Karyawan Pusat Survey Geologi						Lain-Lain (Pengaduan terkait pembelian barang senilai Rp. 45 miliar di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi, tetapi fisik barang tersebut belum diterima)	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadakan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan ditujukan kepada Menteri ESDM 4. Kronologis peristiwa yang diadakan/dilaporkan tidak jelas.
32		14 April 2015	Pegawai Puslitbang Pemukiman kementerian PU						Permohonan pemeriksaan oleh tim BPK atas prosedur pengadaan dan kebenaran spesifikasi alat laboratorium tahun 2014 (merupakan surat kedua)	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadakan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi 4. Kronologis peristiwa yang diadakan/dilaporkan tidak jelas.

33		15 April 2015	IGN. Sudarsono MD.	Laki-Laki					Pengaduan terkait pemotongan uang operasional kegiatan di BNN Provinsi DKI Jakarta	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadukan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan ditujukan kepada Presiden RI 4. Kronologis peristiwa yang diadukan/dilaporkan tidak jelas.
34		15 April 2015	Endang Saputra	Laki-Laki					Pengaduan dugaan korupsi pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bupati Karawang TA 2013	Sudah Terpenuhi Penyampaian ND dari Kalan BPK Provinsi Jawa Barat ke Tortama KN V No. 178/ND/XVIII.BDG/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan Penyampaian ND dari Tortama KN V ke Kepala Biro Humas dan KSI No.614/ND/XVIII/07/2015 tanggal 7 Juli 2015 serta sudah dibuatkan Surat Keluar No.235/S/X.2/7/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Kepala Biro Humas dan KSI selaku Ketua PPID karena tidak ada alamat dari si Pengadu maka surat berada di Biro Humas dan KSI Unit LI.
35		28 April 2015	PT Asricitra Pratama	Laki-Laki					PT Asricitra Pratama sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi melalui LPSE di Universitas Mulawarman, merasa dirugikan karena adanya pemutusan kontrak secara sepihak	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Surat Keluar dari Sekretaris Jenderal BPK No.207/S/X.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal tanggapan BPK atas Laporan Pengaduan. Berdasarkan ND dari Tortama KN VI diperoleh tanggapan bahwa Permasalahan pemutusan kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di Universitas Mulawarman TA 2011 senilai RP19.970.655.000,- telah diungkap pada CaLK Kemendikbud 2014 dan merupakan salah satu Temuan Pemeriksaan atas LK Kemendikbud 2014
36		28 April 2015	Kantor Advokad & Pengacara Moh. Din Toatubun, H. SH & Partner's	Laki-Laki					Penyampaian Somasi ke-2 terkait permasalahan pembangunan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada tanah adat Rangmetan petuanan Ohoi Faan-Wearililir	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hasil analisa dari AKN VI dinyatakan bahwa permasalahan pengadaan tanah tersebut tidak sepenuhnya sesuai prosedur atau ketentuan sehingga berpotensi menjadi sengketa di kemudian hari
37		28 April 2015	Maringin Situngkir, SH.	Laki-Laki					Permohonan perlindungan hukum atas tindakan Basuki Darmo Sentono selaku Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang menghilangkan uang tunjangan kinerja yang bersangkutan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan topik aduan tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetapi menyangkut kepentingan pribadi. Surat ditujukan kepada Presiden RI
38		28 April 2015	anonim						Pengaduan terkait pengadaan barang inventaris pada BP-PAUDNI Reg. I Medan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadukan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Kronologis peristiwa yang diadukan/dilaporkan tidak jelas.
39		28 April 2015	anonim						Pengaduan terkait proses tender yang menggunakan anggaran PLN yang telah disalahgunakan oleh oknum-oknum Direksi terdahulu karena merasa belanja investasi dan operasi yang menggunakan anggaran PLN dilindungi oleh payung hukum yaitu Keputusan Direksi dikarenakan PLN tunduk pada Undang-Undang Perseroan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadukan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN 4. Kronologis peristiwa yang diadukan/dilaporkan tidak jelas.
40		28 April 2015	Erwin Kallo	Laki-Laki					Permohonan perlindungan hukum tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang Walikota Palu dan oknum aparat BPN di daerah Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah terhadap tanah PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan topik aduan tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetapi menyangkut kepentingan pribadi, dan surat ditujukan kepada Presiden RI

41		28 April 2015	anonim (Anggota Cleaning Service Universitas Negeri Padang)						Kejanggalan dalam penawaran dan kontrak Cleaning Service, karena di klausul kontrak itu ada salah satu pernyataan yaitu sanggup memberikan Jamsostek/BPJS kepada Anggota Cleaning Service tapi kenyataannya sudah 2 tahun belum pernah mendapatkan Jamsostek/BPJS sebagai jaminan kesehatan.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadukan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi
42		28 April 2015	Forum Paguyuban Orang Tua Siswa SMK Sulawesi Selatan (FPOS4)						Permohonan Audit Investigasi kegiatan program bidang pendidikan menengah kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan T.A 2014	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti 1. BPK Pwk. Prov. Sulsel belum bisa memenuhi permintaan audit investigatif kegiatan program bidang pendidikan Prov. Sulsel Tahun 2014 dan akan menjadikan pengaduan ini sebagai perhatian pada pemeriksaan yang akan datang. 2. Terkait pelaksanaan belanja pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, Perwakilan sudah melakukan pemeriksaan secara uji petik dan hasilnya sudah dilaporkan dalam LHP atas LKPD
43		28 April 2015	1. Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) a.n T.R Arif Faisal 2. Surat dari Anggota DPRD Labuhan Batu a.n M.H.D Rulis Harahap.	Laki-Laki					1. Terkait laporan dugaan korupsi pembayaran gaji PNS Pemerintah Kabupaten Langkat 2. Perihal Laporan pengadaan struktur organisasi dan tata kerja RSUD Aek Kanopan cacat Hukum.	Sudah Terpenuhi Surat sudah di balas oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Pengadu sudah datang ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pertemuan.
44		28 April 2015	Koalisi Masyarakat (KOMA) se-Kota Bogor	Laki-Laki					Dugaan pemalsuan lembar Perda dengan adanya dua versi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka rencana Pemkot Bogor untuk optimalisasi aset terminal Baranangsiang. (Uraian lengkap dapat dilihat pada Lampiran).	
45		29 April 2015	Anggota DPRD Kab. Labuhanbatu Utara a.n. Mhd. Rulis Harahap	Laki-Laki					Pompanisasi TA 2009 di Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu tidak pernah berfungsi sejak dibangun (proyek dianggap gagal)	Sudah Terpenuhi Surat sudah di balas oleh BPK Perwakilan Sumatera Utara dan Pengadu sudah datang ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara serta melakukan pertemuan.
46		29 April 2015	Marihot Tampubolon	Laki-Laki					Permintaan konfirmasi terkait letak lahan tanah peruntukan dua Unit Sekolah Baru (USB) yang disebutkan dalam LHP BPK sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bekasi dan belum disertifikatkan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti oleh Subbagian LI, karena surat oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat disampaikan langsung kepada AKN V (tidak melalui PIK) dan telah ditindaklanjuti oleh AKN V.
47		04 Mei 2015	Bpk/Ibu Mering Ibaudkk.(Kabupaten Kutai Barat)						Pengaduan terkait pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi di beberapa SKPD Kab. Kutai Barat	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hasil dari telaahan Ka Subbag Hukum BPK Perwakilan Kaltim bahwa Laporan Pengaduan tidak dapat di tindak lanjut oleh BPK Perwakilan Kaltim, karena ketidakjelasan identitas pelapor & alamat pelapor
48		04 Mei 2015	1. Pande 2. Polman Sianturi	Laki-Laki					Permintaan konfirmasi terkait sewa pemanfaatan aset negara oleh Jakarta International School	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu disampaikan kepada AKN terkait, karena permintaan konfirmasi ditujukan kepada Menteri Keuangan dan BPK hanya sebagai tembusan.
49		07 Mei 2015	R. Slamet Agus Draminto	Laki-Laki					Pengaduan atas Pengelolaan Gedung Mall of Sri Tanjung Banyuwangi. PT Dian Graha Utama yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk mengelola Gedung Mall of Sri Tanjung Banyuwangi Banyuwangi. PT Dian Graha Utama merasa dirugikan karena digugat ke Pengadilan dengan alasan wanprestasi karena belum membayar kontribusi	Sudah Terpenuhi (Surat sudah di disposisikan ke Ka Sub Aud Jatim IV yang isinya, untuk menjadi perhatian dan sebagai bahan pemeriksaan. Pada tanggal 10 Agustus 2015. Dan sudah di tindak lanjut pada tahun 2014)

50		07 Mei 2015	Tansi Sitorus	Laki-laki				Berkaitan denganberlarut-larutnya permasalahan wilayah Taman Nasional Teso Nilo di Wilayah Pemerintah Desa AIR HITAM khususnya Kabupaten Pelalawan di Taman Nasional Teso Nilo	Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu disampaikan kepada AKN terkait, karena permintaan konfirmasi ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan hidup BPK hanya sebagai tembusan.
51		11 Mei 2015	Otto Cornelis Kaligis	Laki-laki				Berkaitan dalam perkara mengenai perselisihan kepengurusan Partai Golkar sehubungan dengan Putusan Sela Pengadilan TUN Jakarta terkait penundaan pelaksanaan keputusan MENKUMHAM No. M. HH. 11. 03-26	Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu disampaikan kepada AKN terkait, karena permintaan konfirmasi ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan Pengaduan yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan tupoksi BPK RI
52		11 Mei 2015	Ayu Harwandi	Perempuan				Merasa keberatan dengan ketentuan pajak yang di berlakukan	Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi dengan di tembuskan kepada Ketua BPK RI dan Pengaduan yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan tupoksi BPK RI yaitu pengelolaan keuangan negara dan daerah tetapi menyangkut kepentingan pribadi
53			Khamnah yang menguasai kepada B.J. Pulumbara sebagai penasehat hukum (Perum Resinda Blok C. 19 No. 12 RT/RW 003/010 Desa. Purwadana Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang.)	Laki-Laki				Permohonan Risalah Lelang No.008/2015 tertanggal 7 Januari 2015 yang di tujukan kepada Kepala Cabang Kantor BNI Syariah Kerawang dengan di tembuskan kepada Ketua BPK RI	Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu disampaikan kepada AKN terkait, karena permintaan konfirmasi ditujukan kepada Kepala Cabang Kantor BNI Syariah Kerawang dengan di tembuskan kepada Ketua BPK RI dan Pengaduan yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan tupoksi BPK RI yaitu pengelolaan keuangan negara dan daerah tetapi menyangkut kepentingan pribadi
54		12 Mei 2015	1. Prof. DR. E. Irwannur Latubual 2. Sulistyowati (Kuasa Hukum)	1. Laki-laki 2. Perempuan				Mengadukan PT Gema Hutani Lestari yang telah merusak hutan Hukum Adat Buru dengan mengambil kayu sebagai hak-hak hidup masyarakat Hukum Adat Buru selama 38 tahun lamanya	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan topik aduan tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah tetapi menyangkut kepentingan pribadi, dan surat ditujukan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
55		12 Mei 2015	Syarifuddin A.R.	Laki-laki				Dari bukti temuan data formal DPPA-SKPD TA 2014 dan DPA-SKPD TA 2015 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, banyak terdapat kejangalan dalam penganggaran program kegiatan yang diperuntukan, terindikasi mark-up	Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi sudah Disposisi ke Ka Sub Aud Jambi II, Ka Setian Jambi, & Kasubag Hukum, isinya sebagai bahan P2 untuk Tahun Anggaran 2015. tanggal 25 Agustus 2015, apabila si Pengadu menanyakan untuk di arahkan ke BPK Perwakilan Provinsi Jambi)
56		12 Mei 2015	H. Iskak Matau	Laki-Laki				Untuk menghapuskan beban hutang Rp. 50.012.100 yang telah dipotong oleh Taspen untuk dikembalikan kepada negara perlu ditinjau kembali dan untuk mengganti biaya perawatan/pemeliharaan atas kendaraan dinas sebesar Rp.21.955.000 rincian pengeluaran dan nota tagihan terlampir	
57		15 Mei 2015	Slamet Utomo	Laki-Laki				Penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggaran hukum terkait pembatalan pemenang lelang (CV Bumi Raya) oleh ULP Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi	

58		18 Mei 2015	Penerima Manfaat Pensiun (P3RI)	Laki-Laki					Permohonan peninjauan kembali penerimaan manfaat pensiun PT. Perkebunan Nusantara VII yang masih dibawah UMR	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan topik aduan tidak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah tetapi menyangkut kepentingan pribadi, Pengadu tidak jelas, dan surat ditujukan kepada Presiden RI bukan kepada BPK
59		18 Mei 2015	Sugi Santosa, SH.,M.H.	Laki-Laki					Penahanan oleh kepolisian Sektor Cempaga Hulu terkait sengketa lahan dan permortalan jalan poros estate SDME oleh masyarakat	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada Kapolsek Cempaga Hulu 2. Topik aduan tidak berkaitan dengan keuangan negara tetapi permintaan untuk pembebasan klien yang ditahan di Polsek Cempaga Hulu
60		19 Mei 2015	Dr. H. Eddy Moeljono	Laki-Laki					Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah TW.IV	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri 2. BPK sebagai tembusan dan akan dikirimkan kepada AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
61		19 Mei 2015	H.Suyoto	Laki-Laki					Jawaban Somasi	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada PT Arthesis Sakti Persada melalui kuasa hukumnya armaya Mangkunegara 2. BPK sebagai tembusan dan akan dikirimkan kepada AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
62		20 Mei 2015	anonim						Pihak pimpinan (direksi) di kantor pusat lepas tangan atas penyelidikan penggunaan dana PKBL yang seharusnya disalurkan kepada para petani oleh cabang PT SHS di daerah, dan dana KMK yang tidak disalurkan ke daerah	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
63		20 Mei 2015	R. Kotambunan	Laki-Laki					Mengadukan dugaan tindakan korupsi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulut Gorontalo yang dipimpin oleh Ir. Fej Wenur (Oni Wenur), yang mengakibatkan proyek-proyek pembangunan jalan dan jembatan di Sulut dan Gorontalo tidak memenuhi syarat dan standar	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN IV dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
64		20 Mei 2015	Imam Buchori	Laki-Laki					Pertanyaan sebagai masukan, apakah BPK telah melakukan audit khusus atas pengelolaan keuangan pasal 31 (4) UUD 1945 baik APBN/APBD	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan hanya merupakan masukan dan tidak memerlukan tanggapan
65		20 Mei 2015	Eggi Sudjana & Partners (Advocate and Counselor at Law) a/n President Direktur Lapindo Brantas Inc.	Laki-Laki					Permohonan Kebijakan Khusus Perpajakan Dalam penanganan dan Penanggulangan Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN III dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait

66		20 Mei 2015	Dr. dr. C. H. Soejono, SpPD-Kger, M.Epid (Direktur Utama RSCM) dan Dr. dr. Ratna Sitompul (Dekan FK UI)	Laki-Laki dan Perempuan					Tanggapan atas Audit BPK terhadap Universitas Indonesia dan temuan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh Program Jakarta Sehat yang merupakan bagian dari FK UI	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN III dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
67		20 Mei 2015	Sarifudin Masik NIP.198507132010011028	Laki-Laki					Pengaduan atas belum diterimanya tunjangan daerah terpercil oleh guru-guru di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT sejak tahun 2014/2015	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Data pengadu tidak lengkap, tidak ada alamat, no telepon maupun alamat e-mail yang bisa dihubungi sehingga pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti 2. Pengadu meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Kemendiknas, dan hal itu telah dilaksanakan setiap tahun 3. Tujuan pengadu adalah untuk mendapatkan tunjangan daerah terpercil, hal itu merupakan di luar tanggung jawab dan kewenangan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa 4. Pengadu menanyakan PP dan UU terkait tunjangan daerah terpercil, dimana PP dan UU tersebut tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang BPK
68		20 Mei 2015	Willy P.	Laki-laki					Kejanggalan dalam kegiatan lanjutan pembangunan bendung dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Belutu 5.832 Ha (4000 ha) dan supervisi konstruksi pembangunan bendung dan peningkatan jaringan irigasi D.I. Belutu	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti. Tujuan pengaduan kepada Pimpinan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II, Prov. Sumut. Pengaduan ini hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
69		20 Mei 2015	Syamsul Bahri	Laki-laki					Belum Diberikannya Hasil Audit Dugaan Korupsi di Disdikpora Palembang oleh BPK Pwk. Palembang	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti. Tujuan pengaduan kepada Kapolda Sumsel dan telah diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan dan didisposisikan ke Sub Auditorat Sumatera Selatan II sehingga apabila si Pengadu menanyakan perihal pengaduan tersebut untuk menghubungi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. (Dari Perwakilan mengirimkan Disposisi dari Kepala Perwakilannya ke Sub Auditorat Sumsel II)
70		20 Mei 2015	Harun Zen CA., dkk	Laki-laki					Pelaksanaan pekerjaan pembangunan badan jalan di dusun III pasa IX, desa teluk kijing III, kec. Lais, Kab. Muba tidak sesuai ketentuan	
71		20 Mei 2015	Suhono	Laki-laki					Permohonan penjelasan permasalahan aset pengganti tanah TNI AL yang terkena jembatan kali Blencong Marunda	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tujuan permohonan informasi/penjelasan kepada kepala Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta

72		20 Mei 2015	Drs. HM. Faishal, S.H., M.H.	Laki-Laki					Pengaduan terkait maraknya penerbitan sertifikat ganda oleh BPN, dan pencetakan blangko sertifikat baru berpotensi adanya tindak pidana korupsi	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tujuan pengaduan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka. BPN dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
73		20 Mei 2015	Drs. I Ketut Subawa, S.H.	Laki-Laki					Pengaduan terkait penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kepemimpinan Gubernur Bali (Made Mangku Pastika) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tujuan pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
74		20 Mei 2015	H. Yana Sunaryana	Laki-Laki					Permohonan keadilan atas pembongkaran paksa papan reklame yang masih sengketa di Mahkamah Agung RA oleh oknum Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dan oknum Kepala Satpol PP Kota Bandung	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
75		21 Mei 2015	Agus Huby kosay	Laki-Laki					Menginformasikan Beberapa kondisi riil yang terjadi di bawah kepemimpinan Bupati John Wetipo dan Wakil Bupati John Banua di Kabupaten Jayawijaya	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
76		21 Mei 2015	R. Widodo S.H	Laki-Laki					Permohonan Persetujuan Penghapusan dan Penjualan bongkaran bangunan pada Kantor Pengadilan Negeri Kebumen	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN I dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait

77		21 Mei 2015	nn						Aadanya indikasi kejadian penyalahgunaan wewenang terhadap keuangan negara yang disinyalir telah dilakukan dengan motif memperkaya diri sendiri, yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait dalam pemeliharaan pesawat Sukhoi.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Data pengadu tidak lengkap, tidak ada alamat, no telepon maupun alamat e-mail yang bisa dihubungi sehingga pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. 2. Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN I dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
78		21 Mei 2015	Bupati Barito Timur	Laki-Laki					Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Tahun 2014	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
79		22 Mei 2015	LSM AMPUH KALTENG	Laki-Laki					Pengaduan terkait Permohonan untuk di Mediasi dan Cek Lapangan masalah Lahan/ Tanah Milik Masyarakat di Areal PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN)	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN IV dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
80		25 Mei 2015	Inarema Law Firm	Laki-Laki					Pemberitahuan Untuk meminjam kembali dengan teliti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait rencana rencana pembelian surat utang yang akan dikeluarkan PT Hutama Karya (Persero)	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
81		25 Mei 2015	H. Prijatmoko	Laki-Laki					Penyerahan aset Sarana dan Prasarana Utilitas umum (Fasilitas Umum/Fasum) Perumahan Suterjo Indah kepada Pemerintah Kota Surabaya	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada Walikota Surabaya; 2. Pengaduan tidak berkaitan dengan Tupoksi BPK dan Pengelolaan Keuangan Negara /Daerah; 3. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi dan BPK hanya sebagai tembusan akan dikirimkan kepada AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.

82		25 Mei 2015	Perwakilan warga Kotamobagu						Keberatan atas kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah (Walikota Kotamobagu) Prov. Sulawesi Utara yaitu Ir. Hj. Tatong Bara dengan tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengangkat dan memberhentikan secara inprosedural PNS dalam jabatan struktural Eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional yang jumlahnya apabila dihitung dapat mengisi 2 s/d 5 SKPD baru khusus menampung para PNS yang di nonjobkan tanpa alasan dan proses hukum yang jelas	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada kepada Ketua Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia; 2. BPK hanya sebagai tembusan dan sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI.
83		25 Mei 2015	H. Lukman Tanjung	Laki-Laki					Untuk memohon keadilan dan perlindungan hukum proyek bandara Letung Kab. Anambas bermasalah dana APBN Tahun 2012-2013 dan anggaran APBD 2013-2014 1,3 Triliun.	Sudah Terpenuhi (Dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepri didisposisikan Ke Kepala Sub Auditorat Kepri yang isinya sebagai bahan informasi awal dalam pemeriksaan)
84		27 Mei 2015	Angling Widjaya	Laki-Laki					Permohonan kepada Perwakilan Ombudsman wilayah DIY dan Jawa Tengah untuk melakukan mediasi untuk penyelesaian permasalahan tanah warisan milik Idji Hatadji yang digunakan oleh TNI AD dipakai sebagai Denhubyah Kodam IV/Diponegoro/Korem 072/Pamungkas	Pengaduan tidak dapat Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tujuan pengaduan kepada Ombudsman wilayah DIY dan hanya sebagai tembusan saja ke BPK; 2. Pengaduan tidak berkaitan dengan Tupoksi BPK; 3. Tujuan pengadu adalah untuk permohonan mediasi terkait permasalahan tanah dengan pihak TNI ADI, hal itu merupakan di luar tanggung jawab dan kewenangan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa 4. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
85		28 Mei 2015	Karyawan & Karyawati Yayasan Adi Upaya	Laki-Laki					Permohonan pemeriksaan atas indikasi penyalahgunaan keuangan di Yayasan Adi Upaya	Pengaduan tidak dapat Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan menyangkut keuangan yayasan yang bukan merupakan ranah pemeriksaan BPK
86		28 Mei 2015	Armein Rizal, B.Ak., MBA (Sekretaris LPSK)	Laki-Laki					Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran LPSK	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN III dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait

87		28 Mei 2015	Abu Ratman, Domatus Wengan, Rumir Oho	Laki-Laki					Laporan pengaduan indikasi KKN oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
88		28 Mei 2015	H. Sigarlaki	Laki-Laki					Pengaduan terkait korupsi proyek infrastruktur, dimana kondisi jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh PU dan Balai Pelaksana Jalan Nasional memprihatinkan (rusak parah), dan banyak proyek yang gagal dan terbengkalai	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN IV dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
89		28 Mei 2015	Ir. Adiwir, M.M.	Laki-Laki					Mempertanyakan dan permohonan permintaan foto copy berkas seluruh kebijakan dan berkas dokumen beserta pendukungnya dari pengadaan pekerjaan SAP dan ME pembangunan Hotel Pesonna PT. Pegadaian (Persero) lokasi Ngupasan dan Tugu Yogyakarta	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Direktur Bisnis Properti dan Logistik PT. Pegadaian (Persero) dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
90		28 Mei 2015	Chusosi Syakur, S.H., M.M. Eka Rahendra, S.H.	Laki-Laki					Permohonan penyerahan asli sertifikat tanah a/n Dr. M. Suliansyah DSA; Dr. Wahyu Sudarsono MPH; Dr. Wahyu Hidayat SP. THT.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
100		29 Mei 2015	Karyawan PT. Survai Udara Penas						Memohon bantuan untuk menyelesaikan masalah gaji yang tertunggak selama 4 Tahun untuk dapat di bayarkan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi 3. Tujuan pengaduan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta ;
101		29 Mei 2015	Teguh Winarno, SE.	Laki-Laki					Klarifikasi Distributor Pupuk Urea Bersubsidi	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait

102		29 Mei 2015	Harun Zen CA., dkk	Laki-laki					<p>Lembar surat klarifikasi No.180/B/DPP.FGLKS.PST/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 kepada dinas PU Bina Marga Kab. OKU Timur di Martapura, yang belum dan tidak dijawab oleh kepala Dinas PU BM. Bahwa Pemerintah OKU Timur (OKUT) Martapura menganggarkan dana APBD TA 2014 sebesar Rp.9.600.000.000 mengerjakan proyek rehab panel jalan betung/petanggan Kec. Semendawai Barat, Belitang mulia melalui dinas PU Bina Marga Kab. OKU Timur yang dikerjakan oleh PT. Putri Jaya tahun anggaran 2014, pemenang penawaran sebesar Rp. 9.315.101.000. Dan Proyek rehab panel jalan batumarta II, VI, X lokasi surabaya kota negara (K.146), fungsional 27.8 Km, Kec Madang Suku III, Suku II, Kab. OKU Timur TA 2014, dana APBD sebesar RP.8.612.600 HPS sebesar Rp.8.800.000.000.</p>	<p>Sudah Terpenuhi Surat sudah berada di Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan I dan II sebagai bahan pemeriksaan, apabila si Pengadu menanyakan perihal pengaduan tersebut untuk menghubungi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.(Dari Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan mengirinkan Disposisi dari Kepala Perwakilannya ke Sub Auditorat Sumsel I dan II)</p>
103		04 Juni 2015	H sigarlaki	Laki-laki					<p>Laporan tentang kejahatan perbankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., tentang Perjanjian Kredit Graha Mandiri</p>	<p>Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan topik aduan tidak berkaitan langsung dengan tupoksi BPK dan keuangan negara, melainkan merupakan permasalahan pribadi dengan Bank Mandiri.</p>
104		22 Juni 2015	The Boi KIA Al Ronny	Laki-Laki					<p>Kronologi mengenai pinjaman Kredit KPR Bank CIMB Niaga</p>	<p>Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi; 3.Tujuan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>
105		22 Juni 2015	Syarifudin	Laki-Laki					<p>Pembatalan Pergub NTB Nomor 37 Tahun 2014 karena merasa keberatan dengan dikeluarkannya Pergub tersebut.</p>	<p>Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi; 3.Tujuan pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.</p>
106		22 Juni 2015	Anggota DPRD Kab. Kuningan Periode 2014-2019						<p>Diduga telah terjadi manipulasi anggaran pada Sekretariat DPRD dengan cara membuat SPJ fiktif, kegiatan dan pengadaan barang dll. Serta terjadi manipulasi pajak-pajak PPH dan juga pajak makan dan minuman dll, dengan diduga ada pemalsuan tanda bukti setoran pajak dari bank (seolah-olah telah dibayarkan) dengan membeli printer/alat validasi yang mirip seperti bukti setoran pajak dari bank.</p>	<p>Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Tidak ada bukti pendukung atas peristiwa yang diadukan; 2. Identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap.</p>

107		29 Juni 2015	Asosiasi PSSI Kota Blitar						Untuk mengklarifikasi terkait Status Asosiasi PSSI Kab/Kota sebagai induk cabang olahraga fungsional yang setiap tahunnya menggunakan dana hibah dari APBD untuk kegiatan pembinaan usia dini, remaja dan amatir khususnya olahraga sepakbola dan futsal terhadap SK Menpora RI No. 01307 Tahun 2015	Pengaduan Tidak Perlu Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan PSSI; 2. Tujuan pengaduan kepada Menpora RI.
108		29 Juni 2015	Jaringan Pengawas Pencegahan Korupsi (JPPK)						Permohonan untuk menyelidiki kegagalan PT DOK Kodja Bahari (DKB) merelokasi Galangan III Perkapalan PT DKB ke Pulau Batam yang dianggap terjadi tindak korupsi	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
109		29 Juni 2015	H. Abdullah Nasution	Laki-laki					Praktek KKN yang dilakukan oleh Kepala Kantor Kemenag Jakarta Barat yang bernama Drs. H. Muhammad Solahi, MM, MA	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi; 3. Tujuan pengaduan kepada Irjen Kementerian Agama.
110		02 Juli 2015	Masyarakat Peduli Klaten						Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Merapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN III dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
111		02 Juli 2015	dr. Mahdi, Sp.THT.	Laki-Laki					Melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran dan kewenangan Direktur Umum dan Keuangan dalam hal pengelolaan RS, seperti: besaran sumber-sumber penghasilan, pembelian alkes, mekanisme pembagian jasa pelayanan yang tidak jelas, dll.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
112		02 Juli 2015	Iksanudin	Laki-Laki					Melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan bahan material agregat serta kualitas mutu beton di lapangan, paket proyek multi years tahap III, pembangunan jalan Kelekat menuju Tabang, di Kec. Tabang, Kab. Kutai Kartanegara	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Pengaduan tersebut sudah di sampaikan ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

113		03 Juli 2015	Rektor IAIN Pontianak	Laki-Laki					Penolakan Audit Investigasi BPKP terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan kegiatan pengadaan Meubelair Rusunawa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
114		03 Juli 2015	Masyarakat Serai serumpun, Kab. Telo, Jambi						Adanya ancaman dan kecemasan serta ketakutan masyarakat di Kec. Serai Serumpun yang dilakukan oleh Saudara Azri, SH, M. Hum. Selaku ketua pengelola Koperasi Maju Bersama dan surat izin mengelola hutan HTR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat Kepada Koperasi Maju Bersama.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan langsung dengan BPK melainkan kepentingan pribadi; 3. Tujuan pengaduan kepada Presiden RI dan Menteri Kehutanan RI.
115		03 Juli 2015	Chuzali H. Situmorang	Laki-Laki					Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menerima surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Sekretariat Negara perihal pengaduan masyarakat di RSUD Labuhan Batu terkait permasalahan pembagian jasa medis atas pelayanan peserta BPJS Kesehatan.	
116		03 Juli 2015	Kampanye Sitanggang	Laki-Laki					Koran Sinar Timur telah menerima informasi dugaan korupsi pada kegiatan renovasi gedung Badan Pengembangan dan Pendidikan Bahasa milik Kementerian Pendidikan TA 2014	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Surkel Karo Humas & Ksi No.256/S/X.2/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Tanggapan BPK atas Pengaduan Masyarakat, yang isinya: 1. BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas LK Kemendikbud TA 2014; 2. Hasil pemeriksaan diungkap dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Kemendikbud TA 2014 No.07C/HP/XIX/05 2015 tanggal 27 Mei 2015
117		08 Juli 2015	Komunitas Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT)	n/a					Mempertanyakan apakah sistem penunjukan langsung PT. Jasa Prima Logistik Bulog (PT. JPLB) sebagai rekanan Perum Bulog untuk menangani seluruh pekerjaan angkutan handling, movenas dan movereg dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tidak akan mengakibatkan monopoli	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
118		08 Juli 2015	Ketua Umum DPP LSM Lidaritas Sosial Pendukung Aspirasi Masyarakat (SS PAMA) Kab. Asahan	n/a					Pengaduan dan permohonan pemeriksaan atas Kepala Sekolah SD 010093 Selawan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan terkait indikasi penyimpangan pengelolaan dana BOS	

119		8 Juli 2015	Benedictus Loin, SH, MH	Laki-laki					Aduan terkait proses pencairan tunjangan sertifikasi guru dan pengawas yang dinilai lambat, bertele-tele, tidak transparan dan tidak akuntabel.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait
120		10 Juli 2015	Jarliman	Laki-Laki					Permohonan audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi pda penggunaan dana hasil penjualan aset tanah bangunan Perum PPD Depo B Cililitan ke Pemda Prov.DKI Jakarta sebesar Rp207.000.000.000 TA 2007	
121		10 Juli 2015	Budiman Tantra	Laki-Laki					Permohonan perlindungan hukum sehubungan adanya e-lelang katalog pengadaan materii TNKB Korlantas Polri TA 2015 yang sedang dilakukan oleh LKPP	
122		10 Juli 2014	Ketua LSM MPR Bernas, Hatta Munir	Laki-Laki					Aduan terkait lahan-lahan perkebunan yang tidak prosedural yang diduga berada di kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan dari Menhut RI	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Ketua DPR Provinsi Riau dan hanya sebagai informasi bagi satker KN IV dan tidak perlu mendapatkan tanggapan.
123		13 Juli 2015	Marwan O. Baasir	Laki-Laki					Dalam pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan terhadap menara telekomunikasi memberatkan sektor industri telekomunikasi dan menimbulkan eksek ekonomi biaya tinggi (high cost economics)	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
124		13 Juli 2015	Forum Pemerhati Kebijakan Masyarakat Paser						Pembangunan jembatan Tana Grogot-Sungai Tuak Tahap II oleh PT. Global Daya Manunggal sebesar Rp2,343,346,598,25 sesuai temuan LHP BPK Perwakilan prov. Kaltim atas Belanja Daerah Infrastruktur Pemerintah Kab. Paser TA 2010 dan 2011	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan identitas pengadu tidak jelas dan tidak lengkap.

125		13 Juli 2015	Saleh Alhasni	Laki-Laki					Mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi melalui surat nomor 041/INFO/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang mempertanyakan dasar hukum belum ditindaklanjutnya audit investigatif atas kerjasama dimaksud	Sudah diadakan Sidang Sengketa di KIP menunggu hasil
126		13 Juli 2015	Gerakan Anti Manipulasi (GERAM) BUMN						Memohon klarifikasi pekerjaan proyek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik Bandara Soekarno-Hatta kepada PT. Angkasa Pura II. Proyek dinilai penuh dengan kejangalan serta persekongkolan tender yang mengarah pada perbuatan tindak pidana korupsi	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Dirut PT. Angkasa Pura II dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah
127		13 Juli 2015	Aloysius Male	Laki-laki					Permohonan penjelasan terkait penerimaan dana pensiun yang tidak sesuai dengan pangkat terakhir pada TNI AD	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti (Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut sedang di konsepkan surat keluar dari PPID)
128		14 Juli 2015	Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi dan Monitoring (DPP-LIMIT)						DPP-LIMIT memberikan beberapa informasi/pertimbangan hukum terkait permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. BNI (Persero) Tbk. di SKC Pare-Pare dan Cabang Bulukumba	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Ketua Dewan Audit merangkap ADK OJK Cq. Kepala Departemen Audit Internal OJK Jakarta dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.
129		14 Juli 2015	PT JASPAMINDO						Sanggahan atas penetapan/pengumuman pemenang lelang pengadaan jasa pengamanan gedung KPP Madya Jakarta	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan pengaduan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPP Pratama Jakarta Menteng Dua dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.
130		15 Juli 2015	Fu'at Kristanto	Laki-Laki					Pengajuan untuk mendapatkan kepastian, keadilan, kepastian dan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintah Negara Republik Indonesia	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan tidak berkaitan dengan tupoksi BPK.

131		15 Juli 2015	Yusri Usman	Laki-Laki					adanya sarang mafia migas pada kegiatan peran PETRAL Pertamina dan dalam memberantas mafia migas hendaknya jangan dikotori dengan memberikan informasi yang menyesatkan publik.	Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti (Penyampaian ND No 224/ND/XX.1/09/2015 dari Kepala Auditorat VII.A tanggal 1 September 2015 perihal penyampaian Jawaban ND No. 1028/ND/X.2/08/2015 atas laporan pengaduan dari Yusri Usman yaitu LSM Pemerhati Kebijakan Energi Nasional. Yang isinya adalah 1. Berdasarkan penjelasan dari internal Audit PT. Pertamina (Persero), diketahui bahwa paska pembubaran Petral secara resmi pada bulan Mei 2015, PT. Pertamina (Persero) telah menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah, yaitu melakukan audit investigasi dan forensik. 2. Pelaksanaan audit investigasi dan forensik tersebut dilakukan oleh auditor internasional "Korda Mentha" dari Australia yang memiliki kantor cabang di Singapura dan di beberapa negara lainnya. 3. Berdasarkan perjanjian No.001/I00000/2015-S0, tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Korda Mentha, audit investigasi dan forensik yang dilakukan oleh auditor Korda Mentha mencakup obyek pemeriksaan pada Petral, PES (Pertamina Energi Services), dan ISC (Integrated Supply Chain) PT. Pertamina (Persero). Pelaksanaan audit oleh Korda Mentha tersebut sampai tanggal 31 Agustus 2015 masih berlangsung)
132		15 Juli 2015	H. Mucran	Laki-Laki					Untuk mendapatkan hak ganti rugi lahan pada pembebasan yang telah masuk dalam rencana pembebasan tahap III oleh tim pembebasan tanah Pemkab. Kutai Kerta Negara.	Sudah Terpenuhi (sudah dibuatkan Surat keluar Kepala Biro Humas Dan Kerja Sama Internasional)
133		15 Juli 2015	Warga Masyarakat Chandra Jaya	n/a					Untuk meminta perlindungan Hak tas tanah dan tanam tumbuh sehubungan dengan adanya program normalisasi kali miring oleh dinas PU pengairan tulang bawang barat, lampung	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait dikarenakan juga tidak terkait dengan tupoksi BPK
134		15 Juli 2015	Imam Buchori	Laki-Laki					Memberikan masukan terhadap BPK terkait UU Keuangan Negara	Sudah dibuatkan Surat Keluar kepada bapak Imam Buchori yaitu ucapan terima kasih atas masukan nya yang di tanda tangani oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional.
135		15 Juli 2015	Yadi Mulyadi	Laki-Laki					Sehubungan dengan hasil kinerja yang dilakukan Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dipertanyakan integritas dan independensinya dengan masih adanya jual beli opini, khususnya terkait LKPD kota Tasikmalaya TA 2013-2014	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni Inspektur Utama dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait dikarenakan identitas si Pengadu tidak jelas.

136		03 Agustus 2015	Yonathan Kogoya, SE	Laki-Laki					Laporan dugaan korupsi di Papua, terkait dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Papua	ND dikirim dari Tortama KN IV kepada Karo Humas dan KSI untuk menyampaikan telaah aduan yang dimaksud. LI kemudian meminta kopi surat aduan kepada staf Tortama IV karena tidak dilampirkan bersama dengan ND Tortama VI No. 212/ND/XIX/04/2015 tanggal 10 April 2015
137		13 Agustus 2015	Izhenk	Laki-Laki					Laporan pengaduan kegiatan sewa kendaraan pada proyek perencanaan dan pengawasan jalan nasional Prov. Bali 2015 yang tidak sesuai ketentuan	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Kronologis kejadian tidak jelas; 3. Tidak ada data pendukung.
138		13 Agustus 2015	Yayat Nurhayat	Laki-laki					Laporan pengaduan indikasi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dengan menerbitkan peraturan tentang penggunaan tanah eks benkok pemerintah kota salatiga yang tidak sesuai peruntukan	
139		14 Agustus 2015	Ir. Muh. Zachbidin Jis Habie	Laki-Laki					Laporan Pengaduan Indikasi Korupsi pada Proyek Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar. Diduga dari dana APBN TA 2014 dan 2015 idikasi terjadinya korupsi dalam proses pelelangan dan pengadaan material tiang pancang sheet pile, tiang pancang spun pile dan pekerjaan reklamasi serta penimbunan batu gajah untuk kolam pelabuhan pada Proyek Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia Kota Makassar yang mana pengelolaan pelelangannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Sudah Terpenuhi (Surat di disposisi ke Kasubaud IV.C.II tanggal 19 Agustus 2015 yang isinya untuk dipelajari dan sebagai bahan pemeriksaan terkait PBJ)
140		14 Agustus 2015	Perwakilan Karyawan PT Indofarma (A/n Djohan Wahyudi, Jusuf Arifandy, Rachman Fauzi, Nur Fahmi Fuad)						Tindak lanjut Penyelesaian Perselisihan di PT indofarma dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada BPK terkait adanya memutasi dan me non job kan karyawannya Karena diduga Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk menggunakan konsideran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam temuannya sehingga mengeluarkan Surat Direksi No.1214/DIR/VII/2014 untuk memerintahkan Bank Mandiri menarik kembali gaji bulan juli 2014 ke 9 Karyawan yang telah di transfer ke bank Mandiri.	Sudah Terpenuhi (Surat keluar dari Sekjen dengan No 301/S/X/10/2015 tanggal 30 September 2015 namun diserahkan kepengadu tanggal 15 Oktober 2015 dikarenakan si pengadu membawa langsung surat keluarnya tersebut)

141		20 Agustus 2015	J. St. Bandaro	Laki-Laki					Penetapan besaran honorarium KPU Prov./Kab./Kota Sumbar yang dianggap pemborosan APBD untuk memperkaya kelompok tertentu	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan identitas pengadu tidak lengkap dan menganalisa Peraturan Gubernur bukanlah tupoksi BPK.
142		20 Agustus 2015	Muliana Sukardi	Laki-Laki					Menyatakan adanya potensi kerugian negara akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 108/PMK.011/2013 dan PTK 007 revisi III tahun 2015	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan bukan merupakan tupoksi BPK untuk mereview Peraturan Menteri Keuangan.
143		20 Agustus 2015	Najib Jawas	Laki-Laki					Mohon klarifikasi dan ditinjau kembali atas pemberian hak atas tanah sertifikat HGB No. 285 tahun 1987 a.n. PT. Pertamina serta PT. PLN di Jl. Yos Sudarso Kel. Sunter Jaya	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dan bukan tupoksi BPK.
144		20 Agustus 2015	Ardyanto	Laki-Laki					Penyalahgunaan wewenang pejabat PT. Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia)	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti dikarenakan ditujukan kepada Menteri BUMN dan tidak ada bukti dan data pendukung.
145		20 Agustus 2015	Samsul Bahri Harun	Laki-Laki					Menemukan banyak keganjilan dan indikasi KKN yang terjadi dalam proses maupun pelaksanaan proyek MP3KI pembangunan jalan penghubung Desa Uekambuno-Watusongu TA 2014	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
146		20 Agustus 2015	Drs. Stepanus Selang, M.M.	Laki-Laki					Sanggahan atas temuan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana otonomi khusus tahun 2011 dan 2012	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.

147		24 Agustus 2015	Rozak Parabak	Laki-Laki					Dispenda Prov. Jawa Timur yang dipimpin Sdr. Bobbi Sumiarsono yang memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf dibawahnya untuk melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) ke Australia pada bulan November 2014 yang diduga tidak sejalan dengan Program Kabinet Trisakti Jokowi, dan Revolusi mentalnya yang baru dibentuk.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
148		24 Agustus 2015	Danil	Laki-Laki					Pengaduan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Harzuan ST. Dan melibatkan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Denpasar(Bali,NTB,NTT) Ir. Kgs Syaiful Anwar, MT.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
149		25 Agustus 2015	DR. Drh. R. Wendeilyna Simarmata, Msi.	Laki-Laki					Terkait servis yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta tahun 2012-2014 kepada tim audit BPK	
150		25 Agustus 2015	nn	nn					terkait indikasi kerugian negara akibat manipulasi akuisisi PT Simpatindo Multi Media (SMM) oleh PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE)	Tidak perlu tanggapan, hanya sebagai informasi kepada satker terkait
151		25 Agustus 2015	Imam Hambali, Ketua Forum Komunikasi Nelayan (FKN) Puger	Laki-Laki					permohonan audit terhadap bangunan perpanjangan <i>break water</i> di muara Plawangan, Puger, Jember	
152		25 Agustus 2015	Anak Baba Ankorp	Laki-Laki					Belum diterimanya dana sertifikasi semester II 2014	Tidak perlu ditanggapi karena tujuan aduan tidak tepat

153		25 Agustus 2015	H. Azroi Spd						Belum diterimanya dana sertifikasi semester II 2014	Tidak perlu ditanggapi karena tujuan aduan tidak tepat
154		26 Agustus 2015	Tito Santoso	Laki-Laki					Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil.	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan bukan merupakan tupoksi BPK dan tidak ada kaitannya pengangkatan PNS dari suatu Instansi Pemerintah
155		01 September 2015	Benediktus Samponu / Ade Mulyana	Laki-Laki				Lain-Lain	adanya indikator kuat tentang tindakan manipulasi, kolusi dan korupsi secara sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Pakuan Bogor dan dikendalikan oleh pihak di luar Yayasan Pakuan Siliwangi yaitu Prof. Dr Eddy Mulyadi Soepardi yang merupakan Anggota BPK. Bahwa Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Bab IV tentang Implementasi Kode Etik.	
156		07 September 2015	a/n Pegawai KIP Aceh Timur (Ruslan, Alkhairi, Indra Putra Alamsyah, Sudawirrahmi)	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Bahwa diduga di kantor Komisi Pemilihan Umum Aceh Timur ada melakukan korupsi baik memperkaya orang lain maupun diri sendiri yang mana Sdr sekretaris Kpu Aceh Timur (Saiful) bersama dengan Bendahara rutin (Maryati) telah melakukan hal-hal tidak benar, salah satunya adalah : SPPD Fiktif, Mark Up Anggaran yang cukup besar dsb.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait, dikarenakan tidak di sertai dengan Dokumen yang lengkap.
157		07 September 2015	Badar Djafar	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Publik menaruh harapan besar untuk tuntaskan kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula Prov. Maluku Utara.	

158		11 September 2015	H. Hanfiah, SH, M.Si	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Mempertanyakan kinerja BPK Prov. Sumsel terkait perhitungan kerugian negara yang sudah dilakukan selama tujuh bulan tetapi belum juga selesai	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti oleh Perwakilan Prov. Sumsel.
158		11 September 2015	Mulyadi	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Pengaduan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Kerinci untuk kepentingan pribadi. Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Pengaduan terkait kepentingan pribadi dan sudah ditangani oleh Kepolisian
159		11 September 2015	Hamdani	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Pengaduan terkait kegiatan Mafia Migas dan KKN Migas di Petro Jambi	
160		15 September 2015	Ikatan Karyawan Bank Panin (IKBP)					Permohonan pemeriksaan	Permohonan pengawasan dan pemeriksaan terhadap praktek-praktek tidak benar di OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Panin	Pengaduan tidak ditindaklanjuti Dokumen aduan tidak lengkap, bukti tidak lengkap, identitas pengadu tidak dicantumkan dengan jelas
161		15 September 2015	Habib Husen Al Kaff	Laki-Laki				Lain-lain	Permohonan pemeriksaan terhadap Mulyono Marsandi, Ketua KPP Pratama Purwokerto, Anggit Catur Prihanto, Ketua Tim, Raden Rudi Saptono, tim pemeriksa pajak supervisor, dan Ike Okta Rina, anggota tim, terkait permohonan pengadu untuk menghapuskan pajak dan sanksi pajak usaha dagang yang bersangkutan karena tidak sesuai dengan ketentuan	Pengaduan tidak ditindaklanjuti Bukan tupoksi BPK karena terkait pajak usaha perorangan
162		21 September 2015	Benyamin P. Naibaho	Laki-laki				Lain-Lain	Mengadukan PT. Inti Telekom Nusantara sebagai pemenang atas pekerjaan belanja sewa jaringan VSAT Badan SAR Nasional tidak mempunyai ijin internet service (ISP) dan ijin penyelenggaraan jaringan tertutup milik sendiri (JARTUP) atas nama sendiri dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Kominfo RI.	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan bukan merupakan tupoksi BPK dan tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah.
163		21 September 2015	Aldo Tua Pasaribu, S.H.	Laki-laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Pengaduan atas hilangnya aset (genset) di Satker PPPTMGB Lemigas	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN IV dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.

164		21 September 2015	UTAS					Lain-Lain	Mengadukan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa dan camat atas setiap transaksi pelepasan hak atas tanah	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Kronologis kejadian tidak jelas; 3. Tidak ada data pendukung.
165		21 September 2015	Jamaluddin	Laki-laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Diduga adanya kekeliruan/kesalahan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar TA.2013.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
166		22 September 2015	Mantan-Mantan Tutor di Universitas Terbuka (UT PBJJ) Nganjuk, Jawa Timur.					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Adanya Kejanggalkan-Kejanggalkan di Universitas Terbuka (UT PBJJ) Nganjuk, Jawa Timur, antara lain : merekrut Tutor Baru dengan melepas Tutor Lama, diduga Ketua Pokjar yaitu Marjo, S.Pd, M.M.Pd yang bisa langsung membangun rumah megah dan membeli beberapa mobil di awal tahun beliau menjadi ketua pokjar.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Kronologis kejadian tidak jelas; 3. Tidak ada data pendukung. Dan Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait.
167		22 September 2015	Subandi	Laki-Laki				Lain-Lain	Melaporkan bahwa akibat pembangunan gedung arsip BPK yang sedang dilaksanakan telah menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah yang bersangkutan, yaitu berupa keretakan pada dinding-dinding di ruang rumah, dan mengkhawatirkan kerusakan tersebut berdampak pada mengganggu kenyamanan dan keselamatan anggota keluarga dan barang-barang yang dimiliki.	Sudah Terpenuhi (Sudah ditindaklanjuti oleh bagian PPK PPSPA dan sudah di koordinasikan dengan pihak waskita, serta akan mengecek ke rumah yang bersangkutan dan akan bertanggung jawab apabila memang kerusakan tersebut akibat dari pembangunan gedung arsip BPK)
168		06 Oktober 2015	Tiba Parangka dan Pdt. Jost Harold Zaty.	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Tanggapan atas surat BPK No.134/S/X/2015 tanggal 25 Februari 2015.	Sudah Terpenuhi (Hal ini sudah disampaikan oleh petugas PIK ke Pengadu dan Pengadu hanya menyampaikan yang penting tindak lanjutnya dan mengucapkan terima kasih)
169		07 Oktober 2015	Agust Firman Hutapea	Laki-Laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat Desa Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur dalam pengelolaan dana desa pusat	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Pengaduan ditujukan kepada KPK (BPK hanya sebagai tembusan) dan data pendukung tidak lengkap

170		12 Oktober 2015	Eggi Sudjana & Partners (Advocate and Counselor at Law) a/n H. Makmur M. Raona, SH	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan	Permohonan Audit Ulang terhadap Temuan BPKP Kalimantan Timur pada Proyek Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance 118 Plus Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010	Sudah Terpenuhi (Surat keluar dari Sekjen dengan No 596/S/X/10/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang isinya tanggapa atas Permohonan Audit ulang tersebut tidak dapat dilaksanakan.)
171	06/PM/PIK/3/2015	15 Oktober 2015	Jhon Wantah S.E	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan	Indikasi penyalahgunaan dana kawasan ekonomi khusus	
172		23 Oktober 2015	Drs. Yasin Dilla	Laki-Laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Dugaan tindak pidana korupsi dana penyetaraan guru Se-Jabar dan dana sertifikasi guru atau Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang terjadi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, sejak tahun 2010-2011	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait dan BPK sebagai tembusan.
173		23 Oktober 2015	Andri Pinontoan	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Dugaan Mark Up dan Fiktif tentang Proyek pengadaan persampahan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.460.000.000, dengan perencanaan di 16 titik kecamatan dan proyek pengadaan bibit jenis mangga dan rambutan, penanaman pohon di sekolah-sekolah menggunakan dana Rp.119.000.000 serta kegiatan penataan ruang terbuka hijau menggunakan dana sebesar Rp.230.000.000 di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	Penyampaian ND dari Kepala Auditorat V.B ke Plt Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara NO.490/ND/XVIII.2/11/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya Penyampaian informasi awal pemeriksaan kabupaten Simalungun dan surat ini juga ditujukan kepada Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
174		27 Oktober 2015	Perwakilan Masyarakat Desa Pundu					Permohonan Pemeriksaan, Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Bahwa PT Windu Nabatindo Sejahtera (WNS)-BGA Grop lokasi kebunnya adalah berada di areal Ex. Inhutani III dan Perolehan dengan modus mengatasnamakan masyarakat yang bersifat ganti rugi tebas tebang (GRTT) dan di areal tersebut termasuk kawasan hutan produksi (HP) yang mana menurut ketentuan Kehutanan Republik Indonesia melalui ijin pelepasan kawasan.	Pengaduan Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak jelas, karena ada 2 nomor telepon yang tercantum di surat sudah dihubungi berkali-kali tetapi tidak aktif; 2. Pengaduan mengadukan Perusahaan swasta yang menduduki bidang tanah milik BUMN, maka untuk melaporkan langsung ke BUMN yang dimaksud dalam hal PT. Inhutani III ini atau melaporkan ke Kepolisian dan BPN.

175		28 Oktober 2015	Ferdian Candra	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan	Lapas Klas IIA Kendari memberikan makanan yang tidak sesuai dengan standar. Hasil audit inspektoralat bulan Juli 2015 menemukan indikasi kerugian APBN tahun 2015 sebesar kurang lebih Rp80,000,000 dalam pengadaan bahan makanan narapidana/anak didik Lapas Klas IIA Kendari	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Biro Humas dan KSI hanya sebagai tembusan
176		28 Oktober 2015	Thaufik Aliman Hakim	Laki-Laki				Lain-Lain	Permohonan bantuan penyelesaian permasalahan ganti rugi atas lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalsel	Pengaduan Tidak Perlu Ditindaklanjuti Karena BPK hanya sebagai tembusan, dan merupakan permasalahan pribadi, bukan merupakan kerugian daerah/negara
177		28 Oktober 2015	Nursitti Sibarani	Perempuan				Lain-Lain	Mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap Plt. PKAD a.n. Drs. Januar Effendy Siregar, M.Si., dan permohonan untuk melakukan audiensi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak juga dilaksanakan	
178		28 Oktober 2015	Bagong	Laki-Laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Laporan perbuatan tidak terpuji dan korupsi yang dilakukan oleh Komandan Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro a.n. Kolonel Cpm Arief Wibowo Djati, S.E.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Kronologis kejadian tidak jelas; 3. Tidak ada data pendukung.
179		28 Oktober 2015	Zainudin, dkk	Laki-Laki				Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	Permohonan perlakuan yang sama di depan hukum pada kasus perencanaan anggaran, penetapan anggaran dan pencairan dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) di Kabupaten Kaur tahun 2009	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VI
180		28 Oktober 2015	Feri Adha	Laki-laki				Permohonan Pemeriksaan	Indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mesuji pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jalan Lingkungan T.A. 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mesuji	

181		28 Oktober 2015	R. Adnan, SH	Laki-laki				Permohonan Pemeriksaan	Dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau dalam kegiatan peningkatan Jalan Simpang Panam – Pantai Cermin dan Jalan Pantai Cermin – Petapahan, yang dikerjakan oleh PT Semangat Hasrat Jaya T.A. 2014	
182	07/PM/PIK/11/2015	11 Nopember 2015	Febri Hendri Antoni	Laki-Laki				Kepegawaian SDM (Kode Etik)	Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	
183		13 Nopember 2015	Forum Peduli Perlindungan Konsumen (Nasabah/Masyarakat Solok)					Permohonan Pemeriksaan	Manajemen PNM Ulamm Syariah Solok mengabaikan Hak-Hak Nasabah dan atau hak-hak konsumennya.	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Berdasarkan SOP Pengaduan Masyarakat dan hasil verifikasi, pengaduan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan: 1. Identitas pengadu tidak lengkap; 2. Topik aduan tidak berkaitan dengan tupoksi BPK 3. Tujuan pengaduan kepada Pimpinan PNM Ulamm Syariah Solok, BPK sebagai Tembusan.
184		13 Nopember 2015	Yosep Kambu	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan	Mencurigai terdapat indikasi-indikasi tentang terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam masa kepemimpinan mantan Ketua STAKNPN Sentani Periode TA 2002-2013	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN V
185		13 Nopember 2015	Justina Lucky	Perempuan				Lain-Lain	Memohon segera dibayar ditunggakan Jasa Asis Tug PT. Merah Putih Mandiri	Pengaduan Sudah Selesai Ditindaklanjuti Hanya sebagai informasi saja kepada satker terkait yakni AKN VII dan tidak membutuhkan tanggapan dari satker terkait

186	08/PM/PIK/11/2015	27 Nopember 2015	Erik Roelan Fauzi	Laki-Laki				Permohonan Pemeriksaan	Permohonan Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan RHL/PPMPBK di Sub- DAS CIRASEA-CISANGKUY Balai Pengelolaan DAS CITARUM CILIWUNG DITJEN PDAS-HL KEMENLH-K	
-----	-------------------	------------------	-------------------	-----------	--	--	--	------------------------	---	--